

**Framing dalam Advokasi Media Isu Transparansi Anggaran  
oleh Organisasi Masyarakat Sipil**  
*Framing in Media Advocacy of Budget Transparency by Civil Society Organization*

Agung Hawari Hadi<sup>1</sup> , Sarwititi Sarwoprasodjo<sup>2</sup> , Ivanovich Agusta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Konten strategis Seknas FITRA;

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB  
E-mail:age.hadi@gmail.com

**ABSTRACT**

*Civil society organizations deliver frames in a press release as a way of communication that voicing ideology through media advocacy to approach policy makers or the public as well as to stimulate debate and construct a meaning. FITRA selected as research subject by considering their activeness in the media. This research purpose is to comprehend how FITRA consider Indonesia budget transparency issues and their Frame development process through press releases. The press releases collected from 2010 until 2014, analyzed using Bendford and Snow Framing concept: collective action frame. Result shows FITRA frames their press releases by raising unaccountable state budget planning, the welfare of lame, bad examples of leadership, budget politicization, poor government performance and lack of budget transparency and public participation. FITRA blames leadership, executive, legislative and political functions. Identification shows people and the country as victims. Solutions carried by FITRA are improved regulation, affirmative action and incentives, budget rationalization and relocation, improving state revenues and reduce the country's debt, budgets monitoring and evaluation, transparency and public participation, PNS rationalization and improvement of the standard used for the state budget. FITRA's Framing react to the government's solution. FITRA also urge people to be critical to the budget policy and invites the public to participate in the budgeting process, especially the supervision of budgeting and realization.*

*Keywords: collective action frame, media advocacy, pers release, social movement*

**Pendahuluan**

Temuan Open Budget Survey tahun 2006 dan 2010 menemukan buruknya kondisi transparansi anggaran negara-negara di dunia (Masud, 2011). Temuan tersebut menyarankan implementasi transparansi anggaran yang menjamin akses publik pada informasi adalah penting (Otiso, 2012). Penelitian yang dilakukan Robinson, (2006 dan 2008), de Renzio dan Krafchik, (2006) serta Carlitz *et al.* (2009) membuktikan bahwa aktivitas OMS pada pengawasan dan advokasi anggaran dapat meningkatkan transparansi anggaran, kesadaran dan partisipasi masyarakat serta berdampak pada kebijakan anggaran. Hal ini didukung oleh Otiso (2012) yang

mengatakan keterbukaan informasi anggaran lebih bergantung pada permintaan rakyat dan advokasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) akan informasi ketimbang pejabat pemerintah yang taat pada ketentuan hukum. Salah satu cara OMS untuk mendapat perhatian pemerintah adalah mengangkat isu melalui advokasi media. Advokasi media menyuarakan ideologi untuk mendekati pembuat kebijakan atau masyarakat, menstimulus debat dan membuat gambaran yang sesuai (Wallack 1994, Waisbord 2001, Atkin dan Rice 2013). Dalam advokasi media OMS melakukan *framing* terhadap suatu permasalahan. *Framing* dikemas dalam siaran pers, kemudian diharapkan dapat dimuat di media-media massa.

Advokasi media berserta frame didalamnya merupakan suatu bentuk komunikasi. Bagaimana OMS dapat mendorong transparansi anggaran di Indonesia melalui siaran pers menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana konstruksi realitas dalam framing siaran pers yang dilakukan OMS akan permasalahan transparansi anggaran Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penguatan bagi masyarakat dan pemerintah bagaimana OMS mengkonstruks makna terutama pada permasalahan penganggaran Indonesia, serta menjadi acuan bagi OMS dalam penerapan advokasi media. Hal ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan komunikasi pembangunan sebagai suatu bentuk komunikasi masyarakat untuk meyakinkan pemerintah.

### Metode Penelitian

#### Penentuan Kasus dan Waktu Penelitian

FITRA dipilih sebagai kasus penelitian dengan empat kriteria, yaitu OMS yang bergerak di bidang advokasi transparansi anggaran, berkegiatan cakupan nasional, aktif di media, dan kaya akan informasi ketersediaan data siaran pers (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian dilaksanakan terhadap siaran pers dalam advokasi media yang dilakukan FITRA di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta Selatan pada bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015.

Tabel 1. *Core framing task*

<i>Diacnostic framing</i>	<i>Prognostic framing</i>	<i>Motivational framing</i>
Mengidentifikasi masalah dan atributnya	Menjabarkan solusi untuk masalah yang dibahas dalam bingkai diagnostik	Memberikan alasan untuk terlibat dalam tindakan kolektif
Fokus pada korban dan siapa yang salah dan tanggung jawabnya pada subjek tertentu	Menyediakan dasar pemikiran untuk solusi yang disampaikan dan membantah logika lawan	Konstruksi kosa kata yang sesuai dengan motif

### Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah siaran pers. Walaupun data yang biasa digunakan dalam analisis *is frame*, adalah berita (Sleurs *et al.* 2003), penggunaan siaran pers dipilih karena OMS bukan *gatekeeper* melainkan peserta yang aktif dalam membingkai isu dan menciptakan dialog Ferree, *et al.* (2002), serta untuk mengetahui pesan aslinya, -bukan versi media-sebagaimana yang diniatkan oleh OMS. Siaran pers didapat langsung dari Seknas FITRA yang juga terdapat pada situs web mereka. Terdapat 46 siaran pers pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2014. Rentang ini dipilih karena tahun 2010 merupakan tahun awal FITRA menggunakan siaran pers. Sedangkan tahun 2014 adalah tahun terakhir dimana penelitian ini dimulai.

### Teknik Analisis Data

Teori *framing* yang digunakan adalah *collective action frame*, dengan alasan penelitian ini melihat aktor dari *frame* yang dibangkitkan dalam pergerakan sosial (Benford dan Snow, 2000). Pengkodean dilakukan dengan berdasarkan teori tersebut melalui dua tahap, yaitu *open coding* dan *focused coding*. *Open coding* merekam kategori atau tema yang muncul, *focused coding* mempersempit tema yang teridentifikasi pada tahap *open coding* (Blackstone, 2012). Pengkodean menjadi dasar penyajian *core framing task* dengan mengelompokkan pengkodean pada isu-isu utama yang diangkat oleh OMS.

## Hasil Dan Pembahasan

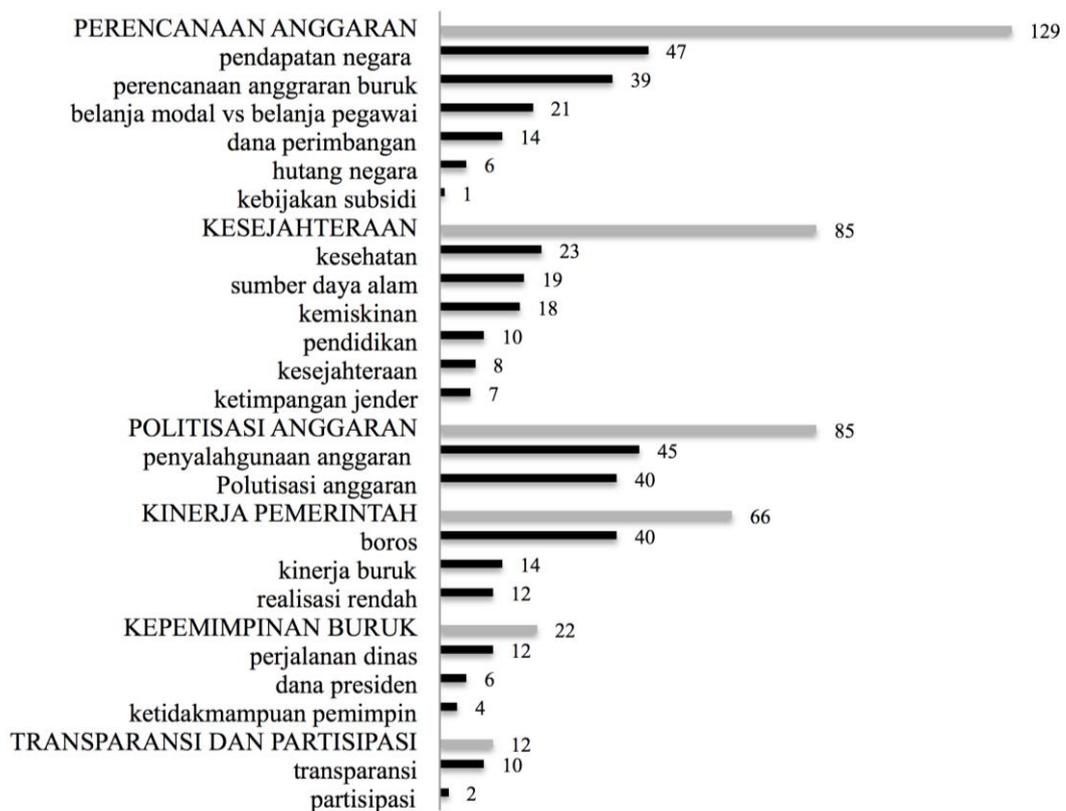
### Keberadaan Masalah Sosial

Hasil analisis *frame* diagnostik menunjukkan FITRA menganggap banyak permasalahan penganggaran Indonesia dimana anggaran belum disusun sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok, yaitu 1) perencanaan APBN tidak akuntabel, 2) kesejahteraan yang timpang, 3) contoh buruk kepemimpinan, 4) maraknya politisasi anggaran, 5) kinerja pemerintah yang buruk serta 6) rendahnya transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat.

Penggunaan isu perencanaan anggaran yang buruk adalah yang terbanyak dari seluruh *frame* diagnostik yang digunakan. FITRA berusaha mempengaruhi interpretasi realitas masyarakat akan buruknya perencanaan anggaran negara secara umum. Didalamnya membahas tentang kurangnya pendapatan negara, buruknya

perencanaan, belanja pegawai yang lebih besar dari belanja modal, permasalahan dana perimbangan, hutang negara dan kebijakan subsidi. Gambaran bagaimana FITRA mengutarakan permasalahan terdapat pada frame-frame yang digunakannya.

Pendapatan negara dianggap yang paling penting dalam penganggaran dan mengungkap buruknya perencanaan anggaran Indonesia. FITRA memangkat isu minimnya alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai, dimana alokasi belanja modal sebagian besar malah ditujukan pada infrastruktur. Isu kesejahteraan menawarkan pandangan permasalahan kesejahteraan rakyat yang tidak direspon dengan baik melalui penganggaran dengan menekankan rasa ketidakadilan sosial. FITRA mengatakan APBN 2013 tidak responsif gender dan program-program yang bersifat pemberdayaan perempuan dan anak, serta pelayanan sosial selalu mendapatkan prosentase kecil.



Gambar 1 permasalahan dalam *frame* diagnostik

Dalam politisasi anggaran, FITRA mengatakan politik anggaran yang buruk menguntungkan para elit politik. FITRA menyorot penambahan program kegiatan baru pada APBN-P dan pembintangan anggaran dapat membuka ruang korupsi karena persetujuannya cukup dengan ketua komisi dan anggota banggar dari komisi tersebut. FITRA juga membahas permasalahan Badan Anggaran dengan mengatakan. "Kewenangan DPR untuk membahas APBN secara rinci, hingga satuan 3, adalah kewenangan yang berlebihan dan berpotensi terjadinya kongkalikong dan pencaloan anggaran" (FITRA, 2013-4-15). Kinerja pemerintah yang buruk dibahas FITRA salah satunya dengan melihat buruknya kinerja penyerapan anggaran oleh kementerian dengan mengkritik bahwa kementerian malas dalam merealisasikan program kegiatan. FITRA menggambarkan lemah dan tidak tegas-nya Presiden dalam memimpin pemerintahan. Pemborosan belanja perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan utama dengan menyatakan "Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan begitu pula dengan penyimpangan belanja perjalanan dinas. 89,5 miliar belanja perjalanan dinas menjadi ajang bancakan birokrasi" (FITRA, 2011-10-23). Selain pemborosan, hutang juga dianggap sebagai produk ketidaktegasan presiden. FITRA menuliskan "Selama SBY memegang jabatan presiden, utang negara bertambah sebanyak Rp1.045 triliun" (FITRA, 2014-1-9). Menurut FITRA, pemerintah percaya bahwa keterbukaan informasi anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu yang hanya berhak diketahui segelintir orang saja. Hal ini dilihat dari minimnya pemerintah daerah yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran melalui situs web mereka. FITRA mengatakan "Tertutupnya informasi anggaran berpotensi membuat

keuangan daerah dirugikan karena rendahnya pengawasan publik" (FITRA, 2013-9-29). FITRA juga mengkritik bahwa pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan terutama proses penganggaran. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan penganggaran terbatas pada forum Musrenbang yang menyebabkan implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dikontrol.

*Framing* diagnostik dikonstruksikan dalam sebuah gerakan sosial guna memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang sifatnya problematik. (Benford dan Snow, 2000). Terlihat bahwa FITRA mengutarakan permasalahan anggaran Indonesia dari sisi ideologi sampai sisi teknis. Penganggaran yang buruk menjadi dasar kausalitas yang diangkat untuk memudahkan audiens mengenali permasalahan. Penggunaan *frame* dalam siaran pers FITRA terlihat pada simbol yang kuat dan berusaha mengundang audiens mengenali permasalahan (Kitzinger, 2007). Dengan *framenya*, FITRA memusatkan perhatian pada kejadian tertentu, penyebab dan dampaknya serta mengarahkan perhatian menjauh dari hal lainnya. Hal ini sesuai dengan Benford (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan makna sangat penting untuk isu-isu keluhan, interpretasi dan atribusi kausalitas. Bersamaan dengan itu, *frame* FITRA memperjelas serangkaian simbol, gambaran dan argumen, serta menghubungkan ide dasar yang memberi tahu apa yang sedang terjadi. (Ferree *et al.*, 2002). FITRA menggunakan *frame* diagnostik yang kerap berisi *frame* ketidakadilan (*injustice*) untuk mengutarakan bahwa terdapat permasalahan dalam penganggaran Indonesia dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa hal ini

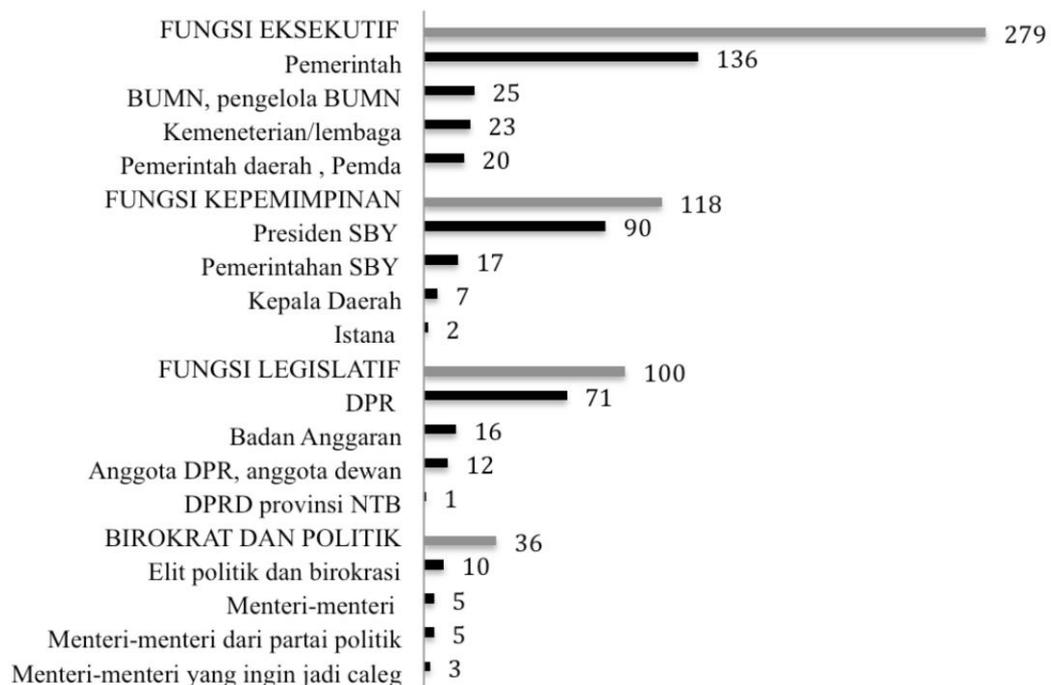
berdampak besar pada keseharian. Secara sederhana FITRA berusaha mengungkap apa yang salah dan mengapa (Noakes & Johnson, 2005). Hal ini sesuai dengan Benford (2000) yang menyatakan aktor gerakan sosial mencari cara untuk mempengaruhi interpretasi realitas. Baik itu benar atau salah, bagi gerakan sosial makna adalah awal dari aksi. Dengan menyentuh struktur nilai yang telah dimiliki audiens target (Gillan, 2008), FITRA mbingkai isu-isu buruknya penganggaran Indonesia dengan baik.

### Pelabelan Agen Kausal

*Framing* diagnostik juga menunjuk sumber kausalitas dan agen yang dianggap bersalah (Benford dan Snow, 2000). Untuk mengidentifikasi agen kausal, peneliti mengidentifikasi frasa atau kalimat yang mengandung menyalahkan atau mencela keadaan atau sumber penyebab. Hasil analisis memunculkan beberapa fungsi yang dianggap sebagai sumber penyebab permasalahan, yaitu 1) fungsi kepemimpinan, 2) fungsi eksekutif, 3)

fungsi legislatif dan 4) fungsi birokrat dan politik. FITRA menyalahkan dari separuh agen kausal permasalahan anggaran pada fungsi-fungsi eksekutif dimana anggaran diamatkan. Fungsi kepemimpinan dan fungsi legislatif berposisi dengan jumlah yang hampir sama, yaitu sekitar seperlima dari keseluruhan. Kemudian sebagian kecil sisanya merupakan pelabelan pada fungsi-fungsi politik dan birokrasi.

Pada fungsi eksekutif, kebanyakan agen kausal dicantumkan pada pemerintah. Pada fungsi kepemimpinan, FITRA dengan gamblang menyalahkan presiden dimana yang menjabat ketika itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan yang dipimpinnya termasuk Istana. Pada fungsi legislatif, pelabelan agen kausal dititik beratkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelabelan fungsi birokrat dan politik terdiri dari agen kausal yang bersifat politis dan berpotensi menyalahgunakan anggaran.

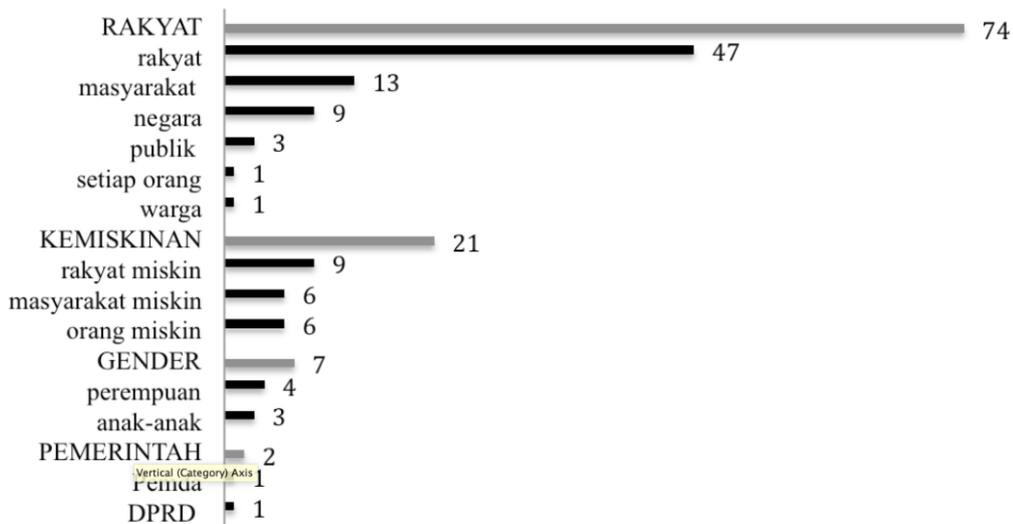


Gambar 2 pelabelan agen kausal

### Identifikasi Korban

Terdapat 4 kelompok pada pemosisian korban dalam *frame* diagnostik yang digunakan FITRA, yaitu 1) rakyat secara umum, 2) rakyat miskin, 3) perempuan dan anak-anak, dan 4) negara. Secara umum, kata rakyat dan masyarakat sering digunakan untuk mewakili korban. FITRA mengangkat kemiskinan sebagai salah satu dampak dari buruknya penganggaran. Hal bisa dilihat dari

identifikasi korban yang mengarah secara spesifik pada kemiskinan dimana kata miskin sering digunakan sebagai sandingan kata rakyat/masyarakat/orang. FITRA juga membingkai isu gender dengan mengangkat perempuan dan anak-anak sebagai korban dari ketidakadilan. Dalam porsi kecil, FITRA juga menganggap pemerintah sebagai korban ketidakadilan penganggaran.



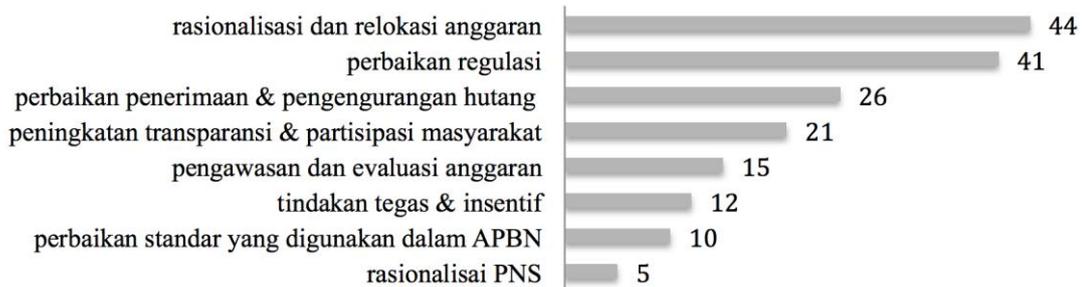
Gambar 3 identifikasi korban

### Artikulasi Solusi FITRA

Hasil analisis *frame* prognostik menunjukkan artikulasi solusi yang digunakan FITRA merupakan 1) perbaikan regulasi, tindakan tegas dan insentif 2) rasionalisasi dan relokasi anggaran, 3) perbaikan penerimaan negara dan mengurangi hutang negara, 4) pengawasan dan evaluasi anggaran, 5) peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, 6) rasionalisasi PNS dan 7) perbaikan standar yang digunakan untuk APBN. Artikulasi solusi disini termasuk *frame-frame* yang mengandung apa saja yang harus dilakukan, strategi yang mendukung rencana dan solusi yang masuk akal (Benford, 2000).

Untuk penganggaran yang lebih baik, FITRA membahas bahwa terdapat

regulasi-regulasi yang perlu diperbaiki dan diperlukan tindakan tegas untuk mendukung regulasi tersebut. Akan ketegasan tersebut, insentif dan disinsentif harus diberlakukan. Menurut FITRA rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dan kebutuhan. Untuk alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat, FITRA menganjurkan relokasi anggaran. Penerimaan negara menjadi titik penting dalam penganggaran. Meningkatkan pendapatan terutama dilihat dari rasio pajak dan laba BUMN yang tertahan. FITRA berusaha menyakinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi hutang Negara dan mensiasati pembayarannya agar tidak menjadi beban APBN. FITRA mendorong pemerintah untuk



Gambar 4 artikulasi solusi

mempublikasikan informasi anggaran kepada publik melalui media informasi yang dapat diakses publik secara luas. Menurut FITRA Pemerintah harus membuka akses publik terhadap pengawasan penerimaan negara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Menurut FITRA partisipasi publik pada tahap pelaksanaan anggaran diperlukan untuk memastikan anggaran sesuai dengan rencana dan memastikan tidak ada mafia anggaran. K/L perlu melaksanakan konsultasi publik selama proses penyusunan RKA dan pembahasannya di DPR melibatkan unsur masyarakat yang luas. Artikulasi solusi FITRA mengajukan beberapa hal yang dapat memperbaiki APBN seperti memasukkan rasio gini dalam indikator makro APBN, pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada sektor riil dan pendekatan pengukuran rakyat miskin dan pengangguran terbuka. Selain itu, FITRA mengajukan standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah. Sedangkan untuk mengurangi beban anggaran karena belanja pegawai, FITRA menyarankan untuk meneruskan moratorium PNSD dan pembatasan jumlah organisasi pemerintah di kabupaten dan kota.

Umumnya siaran pers FITRA terdiri dari paragraf pembuka, uraian permasalahan dan tuntutan sebagai solusi. Uraian permasalahan terdiri dari beberapa paragraf sedangkan tutuan

berupa daftar dengan kalimat pendek. Hasil analisis menunjukkan dalam keseluruhan siaran pers FITRA, *frame* diagnostik yang digunakan berjumlah lebih dari dua kali lebih banyak dari pada *frame* prognostiknya. *Frame* diagnostik seharusnya seimbang dengan *frame* diagnostik yang digunakan. Jika salah satunya terlalu banyak akan menghasilkan kurangnya resonansi suatu *frame* pada simpatisan gerakan. Jika OMS terlalu fokus membingkai permasalahan tanpa mengutarakan solusi maka *frame* menjadi tidak efektif karena masalah terlihat tidak terpecahkan. Sebaliknya penekanan yang terlalu banyak pada solusi kemungkinan besar akan gagal memotivasi individu. (Snow dan Corrigall-Brown, 2005). Akan tetapi *frame* prognostik yang digunakan FITRA menyediakan solusi spesifik dan dapat dikerjakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada setiap siaran persnya. Maka solusinya tidak samar, *frame* prognostik menjadi influensial dalam memotivasi individu untuk beraksi. (Benford 2005).

### Refutasi Solusi Pemerintah

Seperti kegiatan *framing* lainnya, *framing* prognostik terjadi pada multi-organisasi yang terdiri dari berbagai OMS yang membentuk industri gerakan, lawan mereka, target pengaruh, media, dan para pengamat (Evans 1997, Klandermans 1992). Kegiatan *framing* prognostik sebuah FITRA mencakup sanggahan (refutasi) dari logika atau kemanjuran (efikasi) solusi yang dianjurkan oleh lawan

(Benford, 2000). FITRA kerap menggunakan refutasi solusi pemerintah dalam mengutarakan *frame* prognostiknya. *Framing* FITRA bereaksi terhadap solusi pemerintah. Sesuai dengan Benford (2000) bahwa aktivitas *framing* lawan dapat mempengaruhi *framing* sebuah gerakan, hal ini berguna sebagai tindakan defensif dan mengembangkan prognosis menjadi lebih jelas. Contoh refutasi FITRA akan solusi pemerintah adalah sebagai berikut.

“Dengan SAL (Sisa Anggaran Lalu) 2012 senilai Rp 56,1 triliun, maka sebenarnya Pemerintah tidak perlu mengajukan APBN Perubahan. SAL tersebut mampu mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp 16 triliun dan kompensasinya Rp 30 triliun. Sehingga tidak diperlukan justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 triliun” (FITRA, 2013-6-2).

### Ajakan dan Motivasi

*Frame* diagnostik dan prognostik tidak mencukupi untuk mengajak massa untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif. Untuk itu FITRA juga membutuhkan *frame* motivasional (Benford dan Snow, 2000). Hal ini lebih fokus pada panggilan aksi dibandingkan *frame* diagnostik dan prognostik yang mengarah pada mobilisasi konsensus. Dengan kata lain, *frame* motivasional kurang lebih merupakan panggilan aksi simbolik. Konsep ini terdiri dari beberapa strategi, yang sering dikaitkan pada penciptaan identitas kolektif (Porta & Diani, 2006). Konstruksi kosakata

Pada siaran pers FITRA, konstruksi kosakata lebih banyak mengarah ke kalimat yang memotivasi masyarakat untuk mengetahui pengawasannya. Maka bias dikatakan *frame* motivasional FITRA menyediakan alasan pelaksanaan aksi prognostik dan harus meningkatkan partisipasi gerakan (Snow dan Benford, 2000).

sering kali diperlukan untuk masyarakat menyelaraskan motivasi individual pada keseluruhan *frame* suatu gerakan yang dibangun melalui retorika tertentu, kosa kata dan diskursi. Akan tetapi penelitian ini tidak menemukan konstruksi kosakata dominan tertentu yang dapat digunakan sebagai identitas kolektif untuk panggilan melawan (misalnya revolusi, *class war* dan ganyang). Hasil analisis menunjukkan *Frame-frame* motivasional dalam siaran pers FITRA ditujukan untuk memobilisasi aksi kolektif dari korban untuk berpartisipasi dalam gerakan dan menggerakkan sumber penyebab melakukan prognostik yang diutarakan. (Johnston, 1995). FITRA mengajak masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan anggaran dan berpartisipasi dalam proses penganggaran terutama pengawasan penganggaran dan realisasinya. *Frame* motivasional FITRA berupa kalimat yang mengajak masyarakat ikut dalam aksi gerakan.

Melihat data-data ini, apakah kita akan nyaman untuk tidur di rumah masing-masing di saat ribuan anak-anak busung lapar menangis kesakitan melawan maut? Apakah kita akan nyaman mengendarai kendaraan dinas mewah yang dibeli dari hasil perasan keringat rakyat? (FITRA, 2012-10-21) ... FITRA mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan ... Kesemuanya itu patut dipertanyakan, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada public (FITRA, 2012-12-13).”

penganggaran Indonesia. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat bersikap kritis terhadap anggaran untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan

“Mari kita lihat, sudah berapa sih anggaran yang dibelanjakan presiden SBY ketika melakukan kunjungan wisata plesiran ke luar negeri ... Coba, kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 untuk

asuransi kesehatan masyarakat miskin, pemerintah melalui kementerian kesehatan hanya mengalokasikan sebesar Rp. 1 Triliun untuk 32,53 juta rakyat miskin (FITRA, 2010-7-3)".

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

FITRA mengutarakan permasalahan penganggaran yang buruk sebagai dasar kausalitas yang diangkat untuk memudahkan audiens mengenali permasalahan dari sisi ideologi sampai sisi teknis. Penggunaan *frame* dalam siaran pers FITRA terlihat pada simbol yang kuat dan berusaha mengundang audiens mengenali permasalahan. Framing FITRA bereaksi terhadap solusi pemerintah. *Frame* prognostik yang digunakan FITRA menyediakan solusi spesifik dan dapat dikerjakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada setiap siaran persnya dan dapat menjadi influensial dalam memotivasi individu untuk beraksi. Tidak terdapat konstruksi kosakata dominan tertentu yang dapat digunakan sebagai identitas kolektif untuk panggilan melawan. *Frame-frame* motivasional dalam siaran pers FITRA ditujukan untuk memobilisasi aksi kolektif dari korban untuk berpartisipasi dalam gerakan dan menggerakkan sumber penyebab melakukan prognostik yang diutarakan.

### Saran

Penelitian ini berdasarkan siaran pers pada periode presiden yang sama. Dengan pergantian presiden di tahun 2015 diharapkan penelitian ini dilanjutkan untuk dapat memperkaya hasil. Perlu dilakukan penelitian lanjut untuk mengetahui proses pembangunan *frame* terutama pada proses strategis sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi perencana advokasi dan kampanye pada organisasi pergerakan sosial lainnya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Atkin CK, Rice RE. 2013. Theory and Principles of Public Communication Campaigns, Fourth Edition. Sage.
- Blackstone, AA. 2012. Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative Methods. Nyak, NY: Flat World Knowledge.
- Benford RD. 2005. The Half-Life of the Environmental Justice Frame: Innovation, Diffusion, and Stagnation. hlm. 37-54 dalam Power, Justice and the Environment: A Critical Appraisal of the Environmental Justice Movement, Cambridge, MA: The MIT Press.
- Benford RD. 1997. An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective. Sociological Inquiry, Vol. 67, No. 4. hlm. 409-430
- Benford RD, Snow DA. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, Vol. 26 2000, hlm. 611-639
- Carlitz R, de Renzio P, Krafchik W dan Ramkumar V. 2009. Budget Transparency Around the World: Results From The 2008 Open Budget Survey. OECD Journal on Budgeting. Vol. 2009/2. hlm. 1-17.
- de Renzio P, Krafchik W. 2006. Budget Monitoring and Policy Influence, Briefing Paper 16, Overseas Development Institute.
- Denzin NK, Lincoln YS. 1998. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage.
- Efroymson D. 2006. Using Media and Research for Advocacy: Low Cost Ways to Increase Success. HealthBridge.
- Ferree MM, Gamson WA, Gerhards J, Rucht D. 2002. Shaping Abortion Discourse: Democracy and the Public Sphere in Germany and the

- United States. Cambridge University Press.
- Gillan K. 2008. Understanding Meaning in Movements: A Hermeneutic Approach to Frames and Ideologies. *Social Movement Studies*, 7(3). hlm.247- 263
- Johnston H. 1995. A methodology for Frame analysis: from discourse to cognitive schemata. In: Johnston, H., Klau- dermans, B. (Eds.), *Social Movements and Culture*. University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, hlm. 217–246.
- Johnston, H. ( 2009). *Culture, social movements, and protest*. Aldershot: Ashgate.
- Kitzinger J. 2007. Framing and Frame analysis. In E. Devereux (Ed.), *Media Studies: Key Issues and Debates*. Los Angeles, CA: SAGE.
- Noakes J, dan Johnston H. (2005). Frames of protest: A road map to a perspective. In H. Johnston & J.A. Noakes (Eds.), *Frames of Protest: Social Movements and the Framing*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Masud H. 2011. Is there Hope for Budget Transparency? : Findings from the Open Budget Survey 2010. *International Journal of Governmental Financial Management*. Volume XI, Number 1, hlm. 43-52.
- Otiso WN. 2012. Existing Budget Transparency Mechanisms and the Effect of the New Constitution in Kenya. *International Journal of Governmental Financial Management*. Vol. 2 No. 3. hlm. 37-44.
- Robinson M. 2006. *Budget Analysis and Policy Advocacy: The Role of Non-Governmental Public Action*, IDS Working Paper 279, Institute of Development Studies, Brighton, United Kingdom.
- Robinson M (ed.). 2008. *Budgeting for the Poor*, Palgrave MacMillan, Basingstoke, United Kingdom.
- Sleurs K, Jacobs G, Van Waes L. 2003. Constructing press releases: quotations as preformulation. *Journal of sociolinguistics*, 7(2), hlm. 192-212.
- Snow, DA dan Corrigan-Brown C. 2005. Falling on Deaf Ears: Confronting the Prospect of Nonresonant Frames. hlm. 222-238 in *Rhyiming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship*, edited by David Croteau, William Hoynes, and Ryan Charlotte. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
- Wallack L.1994. *Media Advocacy: A Strategy for Empowering People and Communities*. *Journal of Public Health*, Vol. 15, No. 4, 1994. Hlm. 420-436
- Waisbord, S. 2001. *Family Tree of Theories, Methodologies and Strategies in Development Communication*. Prepared for The Rockefeller Foundation. Tersedia dari <http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/familytree.pdf> (diacu 20 Desember 2014)



